

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat Tahun 2015 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 24 Mei 2016  
Plt. Kepala Perwakilan  
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono

NIP 197006011991031002

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Singkatan	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A. 1. Dasar Hukum	9
A. 2. Profil dan Kebijakan Teknis BPK RI	10
A. 3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A. 4. Basis Akuntansi	18
A. 5. Dasar Pengukuran	18
A. 6. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
B. 1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	31
B. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
C. 1. Penjelasan Umum Neraca	35
C. 2. Penjelasan Per Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
D. 1. Penjelasan Umum Laporan Operasional	38
D. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
E. 1. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	41
E. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
F. 1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	43
F. 2. Pengungkapan Lain-lain	43
F. 3. Rekening Pemerintah	43
F. 4. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan oleh KAP	43
VI. Lampiran A.1 serta Lampiran 1 – 32	

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan TA 2014	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	2
Tabel 3	Ringkasan Laporan Operasional yang berakhir TA 2015 dan TA 2014	3
Tabel 4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	3
Tabel 5	Penggolongan Kualitas Piutang	29
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset	30
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2015	31
Tabel 8	Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2015	31
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2015 dan TA 2014	32
Tabel 10	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi/Jenis Belanja TA 2015	32
Tabel 11	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program TA 2015	33
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015 dan TA 2014	33
Tabel 13	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014	34
Tabel 14	Komposisi Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014	35
Tabel 15	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2015	36
Tabel 16	Komposisi Perbandingan Laporan Operasional per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	38
Tabel 17	Rincian Perbandingan Beban Operasional per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	39
Tabel 18	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	39
Tabel 19	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	40
Tabel 20	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	40
Tabel 21	Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	41
Tabel 22	Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014	42

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ANAO	: <i>Australian National Audit Office</i>
AusAID	: <i>Australian Agency For International Development</i>
BMN	: Barang Milik Negara
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditama Binbangkum	: Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EPP	: Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KHKKN/D	: Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KUN	: Kas Umum Negara
LABH	: Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKPP/LKKL	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LN	: Luar Negeri
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran
MAK	: Mata Anggaran Keluaran
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

PSMK	: Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
Pusdiklat	: Pusat Pendidikan dan Latihan
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kegiatan dan Anggaran
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RM	: Rupiah Murni
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	: Satuan Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SS	: Sasaran Strategis
SSBP	: Surat Setoran Pendapatan Bukan Pajak
SSPB	: Surat Setoran Pengembalian Belanja
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UM	: Uang Muka
UP	: Uang Persediaan
USAID	: <i>United State Agency International Development</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 24 Mei 2016  
Plt. Kepala Perwakilan  
BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono  
NIP 197006011991031002

17

## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat Tahun 2015 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp7.775.770.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara TA 2015 adalah sebesar Rp6.853.189.820,00 atau mencapai 88,14% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015 dan TA 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran**  
**TA 2015 dan TA 2014**

*(dalam rupiah)*

	TA 2015			TA 2014
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN &amp; HIBAH</b>	-	-	-	-
<b>Belanja Transaksi Kas</b>				
Belanja Rupiah Murni	7.775.770.000	6.853.189.820	<b>88,14</b>	6.314.937.325
Belanja Pinjaman dan Hibah	-	-	-	-
<b>Belanja Transaksi Non Kas</b>				
Belanja Barang Non Kas	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>	<b>6.314.937.325</b>

## II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2014.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014**

*(dalam rupiah)*

Akun	31 Desember 2015	31 Desember 2014	Nilai Kenaikan (Penurunan)	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	-	-	-	0%
Aset Tetap	-	-	-	0%
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	0%
Aset Lainnya	-	-	-	0%
<b>Jumlah Aset</b>	-	-	-	0%
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	0%
<b>Jumlah kewajiban</b>	-	-	-	0%
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	-	-	-	0%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	-	-	-	0%
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	-	-	-	0%

## III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk per TA 2015 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.853.443.890,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.853.443.890,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp6.853.443.890,00.

Ringkasan Laporan Operasional TA 2015 dan TA 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Ringkasan Laporan Operasional**  
**TA 2015 dan TA 2014**

*(dalam rupiah)*

	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan	-	-	-	-
Beban	6.853.443.890	0	6.853.443.890	0
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	<b>0</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	<b>0</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	-	-	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	<b>0</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	<b>0</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp6.853.443.890,00 kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan senilai Rp254.070,00 dan ditambah koreksi-koreksi senilai Rp0,00 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.853.189.820,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp0,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 dan TA 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Ringkasan Perubahan Ekuitas**  
**TA 2015 dan TA 2014**

*(dalam rupiah)*

	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
<b>EKUITAS AWAL</b>	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	-	<b>(6.853.443.890)</b>	-
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>	<b>254.070</b>	-	<b>254.070</b>	-
Penyesuaian Nilai Aset	254.070	-	254.070	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-	-	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN</b>	-	-	-	-
<b>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>6.853.189.820</b>	-	<b>6.853.189.820</b>	-
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	-	-	-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	-	-	-	-

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 *Audited* diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TA 2015 DAN TA 2014

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	0,00	-
<b>BELANJA</b>	B.2.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.2.2.2	7.775.770.000	6.853.189.820	88,14	6.314.937.325
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>	<b>6.314.937.325</b>
<b>Belanja Modal</b>	B.2.2.3				
<b>Jumlah Modal</b>		-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>	<b>6.314.937.325</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan ini – Halaman 5

## NERACA

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2015 DAN PER 31 DESEMBER 2014**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2015	2014
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.2.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	-	-
Persediaan	C.2.1.2	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2.2</b>		
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.2.3</b>		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.2.4</b>		
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.2.5</b>		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.2.6	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan ini – Halaman 6*

## LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT  
LAPORAN OPERASIONAL  
TA 2015 DAN TA 2014

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>	D.2.2		
Beban Persediaan	D.2.2.1	71.732.769	-
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.2	875.878.918	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.3	5.905.832.203	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.853.443.890</b>	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(6.853.443.890)</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.2.3		
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(6.853.443.890)</b>	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.2.4		
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(6.853.443.890)</b>	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan ini – Halaman 7

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2015 DAN PER 31 DESEMBER 2014

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.2.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(6.853.443.890)	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.2.3	254.070	-
Penyesuaian Nilai Aset		254.070	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.2.4	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.5	6.853.189.820	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan ini – Halaman 8

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## **A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT**

### **A.2.1 RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I PUSAT**

#### *Rencana Strategis BPK RI*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat adalah satuan kerja vertikal BPK RI, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat mengikuti Renstra Lembaga BPK RI. Renstra BPK RI Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

#### **1. Visi**

“Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan”.

## 2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

## 3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK RI menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Independensi; bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi;
- b. Integritas; bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
- c. Profesionalisme; dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada struktur yang berlaku.

## 4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK RI berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK RI.

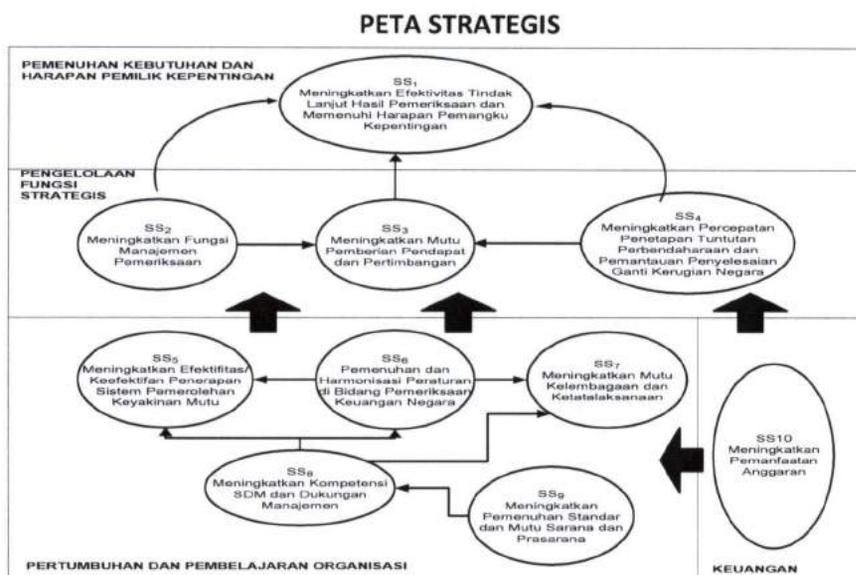
## 5. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK RI menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (SS<sub>1</sub>);
- b. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS<sub>2</sub>);
- c. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS<sub>3</sub>);
- d. Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS<sub>4</sub>);
- e. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SS<sub>5</sub>);
- f. Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara (SS<sub>6</sub>);
- g. Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan (SS<sub>7</sub>);
- h. Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen (SS<sub>8</sub>);
- i. Meningkatkan pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS<sub>9</sub>);

j. Meningkatkan pemanfaatan Anggaran (SS<sub>10</sub>).

Kesepuluh sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK RI. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK RI memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut ini:



**6. Indikator Kinerja Utama BPK RI**

- a. 60% dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh *auditee*;
- b. 65% dari laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum;
- c. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK RI menjadi 4,10;
- d. Jumlah LHP yang diterbitkan menjadi sebanyak 1.745;
- e. Jumlah LHP pemeriksaan kinerja yang diterbitkan sebanyak 235;
- f. 95% ketetapan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan;
- g. 95% presentase pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan selesai;
- h. Menerbitkan 2 (dua) buah pendapat BPK RI;
- i. 75% presentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan;
- j. Menerbitkan 1.231 buah laporan pemantauan kerugian negara;
- k. Menyelesaikan tindak lanjut 90% rekomendasi *peer review*;
- l. Menyelesaikan 95% penyusunan Peraturan BPK RI;
- m. 75% pemenuhan ketersediaan perangkat lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan;
- n. 65% pegawai memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- o. 90% pemenuhan standar pelatihan pemeriksa;
- p. Indeks kepuasan kerja pegawai mencapai 3,70;

- q. 100% pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja;
- r. 95% proses bisnis telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- s. Opini atas Laporan Keuangan BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- t. Pemanfaatan anggaran sebesar 90%.

Matrik hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
		2. Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum
		3. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	4. Jumlah LHP yang diterbitkan
		5. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan
		6. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan
		7. Persentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan
		8. Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan
		9. Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan
		10. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan
	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	11. Persentase rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti
	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	12. Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK
	Meningkatkan Efektivitas Penerapan SPKM	13. Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	14. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan
		15. Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa
		16. Indeks kepuasan kerja pegawai
	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	17. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja
		18. Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	19. Opini atas laporan keuangan BPK
		20. Persentase pemanfaatan anggaran

## 7. Lingkup Tugas

Sesuai dengan mandat undang-undang, berkenaan dengan

pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, BPK RI melaksanakan tiga macam pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan Keuangan; pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;
- b. Pemeriksaan Kinerja; pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD;
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu; pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

#### **8. Lingkungan BPK RI**

BPK RI memperhatikan berbagai perubahan yang muncul, dapat berasal dari lingkungan global, regional, nasional, dan internal organisasi, yang sekaligus menjadi faktor tantangan dan peluang.

#### **9. Organisasi BPK RI**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

#### **10. Pegawai BPK RI**

BPK RI mengembangkan kemampuan pegawainya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan.

#### **11. Pemilik Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang diperiksa (*auditee*) dan instansi penegak hukum;
- c. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- d. Warga Negara Indonesia;
- e. Lembaga-lembaga Internasional.

#### **12. Laporan Hasil Pemeriksaan**

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan sesuai kewenangannya.

#### A.2.2 RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BPK RI

*Restrukturisasi  
Program dan  
Kegiatan BPK RI*

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Surat Edaran dimaksud berisi Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (termasuk BPK RI) sebagai pedoman dalam upaya-upaya:

1. Penataan kembali program dan kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan) BPK RI yang disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan penanggungjawab program/kegiatan;
2. Penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas BPK RI berdasarkan proyeksi ketersediaan anggaran (*resource envelope*) jangka menengah; dan
3. Pemantapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJM dan Renstra BPK RI hingga penyusunan RKP, Renja BPK RI, RKA BPK RI, dan DIPA yang didukung oleh sistem dan informasi (*database*) perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Dengan berpedoman pada surat edaran tersebut maka seluruh Kementerian Negara/Lembaga termasuk BPK RI diminta untuk melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, berkoordinasi dengan mitra kerja terkait di Bappenas dan Departemen Keuangan c.q. DJA serta menyampaikan hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

BPK RI telah berhasil menyusun Program dan Kegiatan BPK RI yang telah digunakan dalam Rencana Kerja (Renja) BPK RI Tahun 2015 dan penganggaran (RKAKL/DIPA) Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	PROGRAM/KEGIATAN
<b>PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))</b>	
<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI</b>
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI</b>
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
<b>03</b>	<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI</b>
1036	Pengawasan oleh Inspektorat
<b>PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))</b>	
<b>06</b>	<b>Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah. Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksa Keuangan Negara</b>
1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Kelembagaan. Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan
1041	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
1042	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
<b>08</b>	<b>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara

Selanjutnya dari program-program tersebut dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan dengan pembagian Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

1. Satuan Kerja di Kantor Pusat

PROGRAM GENERIK DI KANTOR PUSAT (DIPA SETJEN)		
UNIT ESELON I / UNIT ESELON II	KODE	PROGRAM/KEGIATAN
<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK</b>
1 Biro Sekretariat Pimpinan	1032	Pelayanan Kesekretariatan, kehumasan dan kerjasama
2 Biro Humas dan Kerja Sama Internasional		
3 Biro Sumber Daya Manusia		
4 Biro Keuangan	1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
<b>Sekretariat Jenderal</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI</b>
1 Biro Teknologi Informasi	1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
2 Biro Umum		
<b>Inspektorat Utama</b>	<b>03</b>	<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI</b>
1 Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	1036	Pengawasan oleh Inspektorat
2 Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan		
3 Inspektorat Penegak Integritas		

PROGRAM TEKNIS DI KANTOR PUSAT (DIPA BPK PUSAT)		
UNIT ESELON I/ UNIT ESELON II	KODE	PROGRAM/KEGIATAN
<b>Ditama Binbangkum</b>	<b>06</b>	<b>Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1 Direktorat KHKKN/D	1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah
2 Direktorat LABH	1038	Pelayanan Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum
<b>Ditama Revbang</b>	<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1 Direktorat PSMK	1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
2 Direktorat EPP	1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan
3 Direktorat Litbang	1041	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
<b>AKN I s.d. VII</b>	<b>08</b>	<b>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1 Auditorat	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara

## 2. Satuan Kerja di Pusdiklat/Perwakilan

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PUSDIKLAT	
Kode	PROGRAM/KEGIATAN DI PUSDIKLAT
<b>PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))</b>	
<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI</b>
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI</b>
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
<b>PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))</b>	
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1042	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PERWAKILAN	
Kode	PROGRAM/KEGIATAN DI PERWAKILAN
<b>PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))</b>	
<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI</b>
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama
1033	Manajemen SDM
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI</b>
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum
<b>PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))</b>	
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara</b>
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat Tahun 2015 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A. 4. BASIS AKUNTANSI

*Basis  
Akuntansi*

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A. 5. DASAR PENGUKURAN

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A. 6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan  
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK RI yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

### **1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

### **2. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

### **3. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

#### 4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

#### 5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Pada setiap akhir periode tahun anggaran, seluruh Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada satuan kerja Eselon I BPK Pusat telah ditransfer keluar ke satuan kerja Eselon I Pusat.

Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
  - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

- Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor  
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBPN, dan lain-lain yang belum disetorkan.  
Pendapatan yang belum disetor ini sebelumnya pada Tahun 2014 dicatat sebagai kontra akun Pendapatan yang Ditangguhkan.  
Khusus untuk pengembalian belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No.S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya  
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai pada tanggal Neraca.  
Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
- Utang Jangka Pendek Lainnya  
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang

Belum Disetor.

- Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)  
Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK RI berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.  
Belanja dibayar dimuka BPK RI berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.  
Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  
Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.  
Akun Piutang Bukan Pajak yang sebelumnya pada saldo per 31 Desember 2014 dicatat sebagai sub akun Piutang PNPB dan Piutang lainnya, untuk Tahun 2015 perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNPB dengan kebijakan yaitu:
  - Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih dan akun ini baru ada pada Tahun 2015. Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:
    - Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
    - Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
    - Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
  - Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya. Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBP yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBP pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:

- 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta
- 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyeteroran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Untuk obat-obatan dicatat pada Persediaan Lainnya dan ditatausahakan pada Poliklinik atau Depo Obat. Jika pada satker belum ada Poliklinik atau pun Depo Obat penatausahaannya dilakukan pada Subbagian Umum atau Biro Umum. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp 300.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK RI terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK RI).  
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK RI Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK RI);
- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.  
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK RI) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada

satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK RI) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

*Aset Lainnya*

#### **d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban*

#### **6. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### ▪ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK RI terdiri dari:

##### ➤ Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:

- 1) Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
- 2) Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan

pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban. Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK RI antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

## 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal Tahun 2015 merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun 2014 ditambah dengan nilai Pendapatan yang Ditangguhkan tahun 2014. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih

## 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan  
Aset Tetap

## 9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pada Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud belum dilakukan penyusutan/amortisasi pada Tahun 2015 tapi akan dilakukan penyusutan pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Penggolongan Masa Manfaat Aset

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

Implementasi  
Akuntansi  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali

#### 10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penjelasan  
Umum LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja  
TA 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
<b>1</b>	<b>Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah</b>	-	-	-
	a. Penerimaan Pajak	-	-	-
	b. PNBPN	-	-	-
	c. Hibah	-	-	-
<b>2</b>	<b>Realisasi Belanja Negara</b>	<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>
	- Belanja Rupiah Murni	7.775.770.000	6.853.189.820	88,14
	- Belanja Pinjaman LN	-	-	-
	- Belanja Rupiah Pendamping	-	-	-
	- Belanja Hibah LN	-	-	-
	- Belanja Barang Non Kas	-	-	-

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

**B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**B.2.1. PENDAPATAN**

Realisasi  
Pendapatan  
Rp0,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (42311)	-	-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)	-	-	-
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	-	-	-
4	Pendapatan Jasa II (42322)	-	-	-
5	Pendapatan Denda (42375)	-	-	-
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	-	-	-
7	Pendapatan Pelunasan Piutang (42392)	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada 31 Desember 2015 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dibandingkan TA 2014 sebesar Rp0,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2015	TA 2014	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (42311)	-	-	-	0,00%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)	-	-	-	0,00%
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)	-	-	-	0,00%
4	Pendapatan Jasa II (42322)	-	-	-	0,00%
5	Pendapatan Denda (42375)	-	-	-	0,00%
6	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (42391)	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah</b>		-	-	-	0,00%

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4 dan 5)

#### B.2.2. BELANJA

Realisasi  
Belanja  
Negara  
Rp6.853,19  
juta

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp6.853.189.820,00 atau 88,14% dari anggaran belanja sebesar Rp7.775.770.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10  
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi/Jenis Belanja  
TA 2015

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2015		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	7.775.770.000	7.130.380.013	91,70
53	Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>		<b>7.775.770.000</b>	<b>7.130.380.013</b>	<b>91,70</b>
Pengembalian Belanja		-	277.190.193	
<b>Jumlah</b>		<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11  
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program  
TA 2015

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	-	-	0,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	-	-	0,00
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	7.775.770.000	6.853.189.820	88,14
<b>Jumlah</b>		<b>7.775.770.000</b>	<b>6.853.189.820</b>	<b>88,14</b>

Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,52% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan realisasi belanja barang terjadi karena pada dasarnya standar biaya umum naik, begitu pula nilai/harga barang seperti tiket dalam perjalanan dinas dalam negeri dan juga karena laju inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM.

Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2015 dengan TA 2014 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 12  
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2015	TA 2014	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	0,00
52	Belanja Barang	6.853.189.820	6.314.937.325	538.252.495	8,52
53	Belanja Modal	-	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.853.189.820</b>	<b>6.314.937.325</b>	<b>538.252.495</b>	<b>8,52</b>

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2 dan 3)

#### B.2.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tidak terdapat anggaran/realisasi Belanja Pegawai pada TA 2015 dan TA 2014.  
Rp0,00

#### B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp7.775.770.000,00 dan realisasi Belanja Barang TA 2015 sebesar Rp6.853.189.820,00 atau Rp6.853,19 juta 88,14% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Realisasi belanja barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.853.189.820,00 dan Rp6.314.937.325,00.

Realisasi belanja sampai dengan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,52% dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Adanya inflasi serta kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
TA 2015 dan TA 2014

*(dalam rupiah)*

Kode Akun	Uraian	TA 2015	TA 2014	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	807.567.165	789.679.518	17.887.647	2,27
5212	Belanja Barang Non Operasional	93.384.452	105.636.790	(12.252.338)	(11,60)
5218	Belanja Barang Persediaan	46.406.000	-	46.406.000	0,00
5221	Belanja Jasa	-	-	-	0,00
5231	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	0,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.183.022.396	6.023.200.267	159.822.129	2,65
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>7.130.380.013</b>	<b>6.918.516.575</b>	<b>211.863.438</b>	<b>3,06</b>
Pengembalian Belanja		277.190.193	603.579.050	(326.388.857)	-54,08
<b>Jumlah Netto</b>		<b>6.853.189.820</b>	<b>6.314.937.525</b>	<b>538.252.295</b>	<b>8,52</b>

Realisasi Belanja Barang (52) TA 2015 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	-
2	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
3	Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp	-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>

*(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)*

### B.2.2.3. Belanja Modal

*Belanja Modal* Tidak terdapat anggaran/realisasi Belanja Modal pada TA 2015 dan TA 2014.  
*Rp0,00*

*(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)*

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 14  
Komposisi Perbandingan Neraca  
Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	%
Aset	-	-	0,00
Kewajiban	-	-	0,00
Ekuitas	-	-	0,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp0,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Aset Lancar  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp0,00 telah disetorkan pada Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
				-
				-
Jumlah				-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp0,00 telah disetorkan pada 30 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
1	30 Desember 2015	1F7595INVRB0VFF9	BNI	303.766.865
2	30 Desember 2015	FC9AE5IRFA9TJMF9	BNI	46.085
Jumlah				303.812.950

**C.2.1.2. Persediaan**

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2015

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2014</b>	-
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	29.112.200
Koreksi Penyesuaian Persediaan	254.070
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>29.366.270</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	29.366.270
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>29.366.270</b>
<b>Total Mutasi</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	-

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 24)

**C.2.2. ASET TETAP**

Aset Tetap  
Rp0,00

Tidak terdapat nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014.

**C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG**

Piutang Jangka  
Panjang Rp0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

**C.2.4. ASET LAINNYA**

Aset Lainnya  
Rp0,00

Tidak terdapat nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

**C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

**C.2.6. EKUITAS**

Ekuitas Dana  
Lancar saldo  
(debet) Rp0,00

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing disajikan disajikan bersaldo (debet) sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL**

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(6.853.443.890)	-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(6.853.443.890)</b>	-	-

Defisit Dari Kegiatan Operasional TA 2015 sebesar Rp6.853.443.890,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dan Beban Operasional sebesar Rp6.853.443.890,00.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2015 sebesar Rp0,00 terdiri dari Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar sebesar Rp0,00, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa TA 2015 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)

**D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL**

Pendapatan  
Operasional  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Pendapatan Operasional TA 2015 dan TA 2014.

**D.2.2. BEBAN OPERASIONAL**

Beban  
Operasional  
Rp6.853,44 juta

Saldo Beban Operasional TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.853.443.890,00 dan Rp0,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat TA 2015 dan TA 2014 terdiri dari:

Tabel 17  
Rincian Perbandingan Beban Operasional  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	TA 2014	%
1	Beban Pegawai	-	-	-
2	Beban Persediaan	71.732.769,00	-	-
3	Beban Jasa	875.878.918,00	-	-
4	Beban Pemeliharaan	-	-	-
5	Beban Perjalanan Dinas	5.905.832.203,00	-	-
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
8	Beban Lain-lain	-	-	-
	<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>6.853.443.890,00</b>	-	-

#### D.2.2.1. Beban Persediaan

Beban  
Persediaan  
Rp71,73 juta

Jumlah Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp71.732.769,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp71.732.769,00 atau 0,00%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 18  
Rincian Beban Persediaan  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2015	TA 2014	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	71.732.769,00	-	-
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
3	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>71.732.769,00</b>	-	-

Terdapat persediaan yang diinput di DIPA Setjen tetapi dibebankan di DIPA Pusat sebesar Rp42.366.499,00.

(Laporan Beban Persediaan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Rekonsiliasi BMN Tahun Berjalan Lampiran 27)

#### D.2.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp875,88 juta

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp875.878.918,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp875.878.918,00 atau 0,00%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 19  
Rincian Beban Barang dan Jasa  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2015	TA 2014	%
<b>Beban Barang</b>				
1	Beban Barang Operasional	790.597.366,00	-	-
2	Beban Barang Non Operasional	85.281.552,00	-	-
3	Beban Kontribusi	-	-	-
<b>Beban Jasa</b>				
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-
2	Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
3	Beban Jasa Konsultan	-	-	-
4	Beban Jasa Profesi	-	-	-
5	Beban Jasa Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>875.878.918,00</b>	-	-

#### D.2.2.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp5.905,83 juta

Jumlah Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp5.905.832.203,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.905.832.203,00 atau 0,00%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	TA 2015	TA 2014	%
1	Beban Perjalanan Biasa	5.700.502.203,00	-	-
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	-	-
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198.130.000,00	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.905.832.203,00</b>	-	-

#### D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan TA 2014.

#### D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa TA 2015 dan TA 2014.

**E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	%
Ekuitas Awal	-	-	-
Surplus/Defisit LO	(6.853.443.890)	-	-
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	254.070	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-	-
Transaksi Antara Entitas	6.853.189.820	-	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	-	-	-
Ekuitas Akhir	-	-	-

Jumlah Ekuitas Awal TA 2015 sebesar Rp0,00.

Jumlah Surplus/Defisit LO TA 2015 sebesar Rp6.853.443.890,00.

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan TA 2015 sebesar Rp254.070,00.

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2015 sebesar Rp0,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas TA 2015 sebesar Rp6.853.189.820,00.

Jumlah Ekuitas Akhir TA 2015 sebesar Rp0,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

**E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.2.1. EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal  
Rp0,00

Nilai Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

**E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO**

(Defisit) LO  
Rp6.853,44 juta

Jumlah (Defisit) LO TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp6.853.443.890,00 dan Rp0,00.

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**E.2.3. PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN**

Penyesuaian  
Nilai Tahun

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp254.070,00 dan Rp0,00.

Berjalan  
Rp254.070,00

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan merupakan Penyesuaian Nilai Aset dan Kewajiban yang dilakukan pada tahun berjalan.

Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Setjen TA 2015 dan TA 2014 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 22  
Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan  
TA 2015 dan TA 2014

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	%
Penyesuaian Nilai Aset	254.070,00	-	-
Penyesuaian Nilai Persediaan	254.070,00	-	-
Penyesuaian Nilai Aset Tetap	-	-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>254.070,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**E.2.4. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Dampak  
Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan/  
Kesalahan  
Mendasar  
Rp0,00

Tidak terdapat saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Panjang TA 2015 dan TA 2014.

**E.2.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Ekuitas Akhir  
Rp6.853,19 juta

Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp6.853.189.820,00 dan Rp0,00. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain.

**E.2.6. EKUITAS AKHIR**

Ekuitas Akhir  
Rp0,00

Nilai Ekuitas Akhir TA 2015 dan TA 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

**F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

**F.3. REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat (890615) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0369530256 atas nama BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Mataram.

*(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 25)*

**F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP**

*(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)*



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG  
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTB  
ESELON I PUSAT  
004 02 890615**

**Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2015  
*Audited***



**Jalan Udayana No. 22 Mataram  
Telp 0370 6163333 Fax 0370 6162999**

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Lampiran-Lampiran Pendukung Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2015

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran:  
a. Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir 31 Desember 2015  
b. Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Belanja Satker periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 melalui KPPN dan BUN
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satker periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 melalui KPPN dan BUN
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Satker periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 melalui KPPN dan BUN
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satker periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 melalui KPPN dan BUN
- Lampiran 6 Neraca Tingkat Satuan Kerja:  
a. Neraca per 31 Desember 2015  
b. Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
- Lampiran 7 Neraca Percobaan per 31 Desember 2015
- Lampiran 8 Laporan Operasional per 31 Desember 2015
- Lampiran 9 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015

### B. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

- Lampiran 10 Catatan Ringkas Barang Milik Negara Satker Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 11 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2015
- Lampiran 12 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Intrakomptabel Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 13 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 14 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 15 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Barang Bersejarah Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 16 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 17 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 18 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Intrakomptabel Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 19 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan - Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2015

- Lampiran 20 Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan – Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 21 Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Proses Penghapusan Kepada Pengelola Barang Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 22 Laporan Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang Telah Diusulkan Proses Penghapusan Kepada Pengelola Barang Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 23 Laporan Kondisi Barang per 31 Desember 2015 (*hasil cetakan khusus BMN yang dalam kondisi rusak*)
- Lampiran 24 Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2015:
  - a. Laporan Barang Persediaan dari aplikasi Persediaan
  - b. Laporan Barang Persediaan dari aplikasi SIMAK BMN

**C. Lampiran-Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung Catatan atas Laporan Keuangan**

- Lampiran 25 Laporan Rekening Pemerintah
- Lampiran 26 Lampiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan KAP
- Lampiran 27 Berita Acara Rekonsiliasi:
  - a. Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 (*tanpa lampiran*).
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) per 31 Desember 2015.
  - c. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) per 31 Desember 2015.
- Lampiran 28 Daftar SSBP untuk Penyetoran Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2015 yang disetor Tahun 2016 beserta fotokopi dokumen SSBP dan Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2015.
- Lampiran 29 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015
- Lampiran 30 Daftar Aset yang Berasal dari Belanja Barang Tahun 2015
- Lampiran 31 Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi Tahun 2015
- Lampiran 32 Lampiran Pendukung CaLK yaitu:
  - a. Kertas Kerja Perhitungan Belanja Barang Dibayar di Muka (*Prepaid*)
  - b. Daftar Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak
  - c. Daftar Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
  - d. Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
  - e. Daftar Penyetoran Piutang Lainnya per 31 Desember 2015
  - f. Kertas Kerja Analisa Belanja Modal
  - g. Kertas Kerja Persediaan
  - h. Status Tanah
  - i. Lampiran Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu:

- Daftar Pembayaran atas saldo Belanja Pegawai/Barang yang Masih Harus di bayar 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2015 (Beserta No. SPM/SP2D)
  - Rekapitulasi Perhitungan Kekurangan Pembayaran Gaji, Uang Makan Pegawai per 31 Desember 2015
  - Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Tagihan Langganan Daya dan Jasa per 31 Desember 2015
- j. Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Sewa Diterima Di Muka



## **LAMPIRAN 1**

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

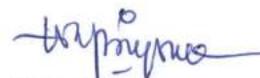
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
	Belanja Barang	7,775,770,000	6,853,189,820	( 922,580,180)	88.14
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>7,775,770,000</b>	<b>6,853,189,820</b>	<b>( 922,580,180)</b>	<b>88.14</b>
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Mataram, 24 Mei 2016

Plt. Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono  
 NIP 197006011991031002

17

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRAST  
 Tanggal : Jumat, 17 Juni  
 Halaman : 1  
 Prog Id : 00\_pasik

No	URAIAN	2015				2014			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1 + A. II)</b>	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	7,775,770,000	6,853,189,820	( 922,580,180)	88.14	7,473,718,000	6,314,937,325	( 1,158,780,675)	84.50
B.1.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.b	Belanja Barang	7,775,770,000	6,853,189,820	( 922,580,180)	88.14	7,473,718,000	6,314,937,325	( 1,158,780,675)	84.50
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA (B.1 + B. II)</b>	7,775,770,000	6,853,189,820	( 922,580,180)	88.14	7,473,718,000	6,314,937,325	( 1,158,780,675)	84.50
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRAST  
 Tanggal : Jumat, 17 Juni  
 Halaman : 2  
 Proglis : lu\_sasakt

No	URAIAN	2015				2014			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)</b>	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Mataram, 24 Mei 2016

Pit. Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono

NIP 197006011991031002



## **LAMPIRAN 2**

### **LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2015**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
TAHUN 2015  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEAMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	28.500.000	28.500.000	22.900.000	22.900.000	0	22.900.000	80.35	5.600.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	97.506.000	118.869.000	85.503.252	85.503.252	0	85.503.252	71.93	33.365.748
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	46.092.000	34.553.600	34.553.600	0	34.553.600	74.97	11.538.400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	46.092.000	34.553.600	34.553.600	0	34.553.600	74.97	11.538.400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	358.500.000	601.900.000	549.320.435	549.320.435	0	549.320.435	91.26	52.579.565
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	365.700.000	609.100.000	556.520.435	556.520.435	0	556.520.435	91.37	52.579.565
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	463.206.000	774.061.000	676.577.287	676.577.287	0	676.577.287	87.41	97.483.713
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.086	463.206.000	774.061.000	676.577.287	676.577.287	0	676.577.287	87.41	97.483.713
088	Sumbangan IHPs								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	18.715.000	10.430.000	5.271.500	5.271.500	0	5.271.500	50.54	5.158.500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18.715.000	10.430.000	5.271.500	5.271.500	0	5.271.500	50.54	5.158.500
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	8.285.000	7.018.500	7.018.500	0	7.018.500	84.71	1.266.500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	8.285.000	7.018.500	7.018.500	0	7.018.500	84.71	1.266.500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115.476.000	115.476.000	73.760.000	73.760.000	0	73.760.000	63.87	41.716.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	115.476.000	115.476.000	73.760.000	73.760.000	0	73.760.000	63.87	41.716.000



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN**  
**TAHUN 2015**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016  
Halaman : 4  
Prog.id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGENBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	226.218.000	226.218.000	193.986.350	193.986.350	0	193.986.350	85,75	32.231.650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	226.218.000	226.218.000	193.986.350	193.986.350	0	193.986.350	85,75	32.231.650
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	407.490.000	407.490.000	295.655.309	295.655.309	( 3.735.000)	291.920.309	71,64	115.569.691
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	407.490.000	407.490.000	295.655.309	295.655.309	( 3.735.000)	291.920.309	72,56	115.569.691
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	633.708.000	633.708.000	489.641.659	489.641.659	( 3.735.000)	485.906.659	77,27	147.801.341
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.158	633.708.000	633.708.000	489.641.659	489.641.659	( 3.735.000)	485.906.659	77,27	147.801.341
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	633.708.000	633.708.000	489.641.659	489.641.659	( 3.735.000)	485.906.659	77,27	147.801.341
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara								
174	Laporan Profil Eritas								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	15.429.000	5.104.000	2.609.700	2.609.700	0	2.609.700	51,13	2.494.300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15.429.000	5.104.000	2.609.700	2.609.700	0	2.609.700	51,13	2.494.300
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	10.325.000	4.833.900	4.833.900	0	4.833.900	46,82	5.491.100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	10.325.000	4.833.900	4.833.900	0	4.833.900	46,82	5.491.100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15.429.000	15.429.000	7.443.600	7.443.600	0	7.443.600	48,24	7.985.400
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1043.174	15.429.000	15.429.000	7.443.600	7.443.600	0	7.443.600	48,24	7.985.400

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
TAHUN 2015  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROVINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016  
Halaman : 5  
Prog.Id : lu\_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1043	15.429.000	15.429.000	7.443.600	7.443.600	0	7.443.600	48.24	7.985.400	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.08	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	7.775.770.000	7.775.770.000	7.130.380.013	7.130.380.013	( 277.190,193)	6.853.189.820	91.70	922.580,180	



## **LAMPIRAN 3**

# **LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2015**

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA  
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
TAHUN 2015  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
Tanggal : 21-06-16  
Halaman : 1  
Prog.Id : lu\_lrapbtkth

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
0	RUPIAH MURNI							
01	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara							
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
118	LHP BPK RI Perwakilan Prov. NTB							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	107,386,583	166,068,610	273,455,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	107,386,583	166,068,610	273,455,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	107,386,583	166,068,610	273,455,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043,118	0	0	107,386,583	166,068,610	273,455,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	107,386,583	166,068,610	273,455,193	0.00	0
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara							
158	Laporan pemantauan BPK RI Perwakilan Prov NTB							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	3,735,000	0	3,735,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	3,735,000	0	3,735,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	3,735,000	0	3,735,000	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA  
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN  
TAHUN 2015  
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROVINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01  
 Tanggal : 21-06-16  
 Halaman : 2  
 Prog.Id : lu\_lrapbbskth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1043.156	0	0	3,735,000	0	3,735,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1043	0	0	3,735,000	0	3,735,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.08	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	111,121,583	166,068,610	277,190,193	0.00	0



## **LAMPIRAN 4**

# **LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2015**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH  
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN  
 UNTUK TAHUN 2015  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS SARKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LRPS.T01  
 TANGGAL : 21/06/16  
 HAL : 1  
 PROG. ID : lue\_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	
			----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				



## **LAMPIRAN 5**

### **LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATKER PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2015**

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN  
UNTUK TAHUN 2015  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB  
 JENIS SATKER : XX Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b  
 TANGGAL : 21/06/16  
 HAL : 1  
 PROG. ID : lue\_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7
		----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				



## **LAMPIRAN 6**

### **NERACA**

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2015**  
**( DALAM RUPIAH )**

Kode Laporan : NSAIKT  
Tanggal : 17/06/16  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 02      B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300      NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615      BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD      KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
TIDAK ADA LAPORAN	0

Mataram, 24 Mei 2016

Plt. Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono  
NIP 197006011991031002

17



## **LAMPIRAN 7**

### **NERACA PERCOBAAN PER 31 DESEMBER 2015**

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2015  
( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 21/06/16  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	922,580,180	
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		956,638,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		108,223,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		28,500,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		68,535,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		48,000,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		6,066,868,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7,200,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		491,806,000
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	807,567,165	
3	521211	Belanja Bahan	70,484,452	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,900,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46,406,000	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	5,977,692,396	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		277,190,193
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198,130,000	
		<b>J U M L A H</b>	<b>8,052,960,193</b>	<b>8,052,960,193</b>

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2015  
( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan: NPSAIKT  
Tanggal : 21/06/16  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
ESELON I : 02 B. P. K. PUSAT  
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		6,853,189,820
0	391117	Penyesuaian Nilai Persediaan		254,070
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	790,597,366	
3	521211	Beban Bahan	62,381,552	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	22,900,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	5,977,692,396	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		277,190,193
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198,130,000	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	71,732,769	
		<b>J U M L A H</b>	<b>7,130,634,083</b>	<b>7,130,634,083</b>



## **LAMPIRAN 8**

### **LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2015**

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	71,732,769	0	71,732,769	0.00
Beban Barang dan Jasa	875,878,918	0	875,878,918	0.00
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	5,905,832,203	0	5,905,832,203	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>6,853,443,890</b>	<b>0</b>	<b>6,853,443,890</b>	<b>0.00</b>

**LAPORAN OPERASIONAL  
 TINGKAT SATUAN KERJA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	( 6,853,443,890)	0	( 6,853,443,890)	0.00
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
0	0	0	0	0.00
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>				
0	0	0	0	0.00
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>	( 6,853,443,890)	0	( 6,853,443,890)	0.00

Mataram, 24 Mei 2016  
 Plt. Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono  
 NIP 197006011991031002

17



## **LAMPIRAN 9**

# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2015**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI : 02 B. P. K. PUSAT  
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT  
 SATUAN KERJA : 890615 BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	0	0	0	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	( 6,853,443,890)	0	( 6,853,443,890)	0.00
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	254,070	0	254,070	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	254,070	0	254,070	0.00
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0	0	0	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,853,189,820	0	6,853,189,820	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0.00
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0.00

Mataram, 24 Mei 2016  
 Plt. Kepala Perwakilan



Wahyu Priyono  
 NIP 197006011991031002

17



## **LAMPIRAN 10**

# **CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA SATKER TAHUN ANGGARAN 2015**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG TAHUNAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. PENDAHULUAN**

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Entitas Pelaporan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Periode Laporan Tahun Anggaran 2015

**II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

➤ Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; dan
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; dan
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.6/2013 tanggal 12 April

2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

➤ Penyusutan

1) Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012;
- b) Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal ini perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.6/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.6/2013 dijelaskan bahwa penghitungan dan pencatatan atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2015, maka:

- a. Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;
- b. Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset Tetap dihapuskan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2) Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh BMN berupa Aset Tetap yang menjadi objek penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus.

3) Masa Manfaat Yang Digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

4) Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan

Penyajian Nilai Tercatat Bruto dan Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Barang Persediaan		Rp	-
Tanah		Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	-	
Gedung dan Bangunan	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-	
Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap Renovasi	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan ATL & ATR	Rp	-	
<b>Nilai Buku Aset</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp	-
<b>Total Aset Tetap</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>
Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Aset yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Rp	-	
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	-	
Aset Tak Berwujud	Rp	-	
<b>Total Aset Lainnya</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Total Aset</b>		<b>Rp</b>	<b>-</b>

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2015 ini adalah sebesar Rp0 (nol rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0 (nol rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN
15. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) eksternal; dan
16. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

##### 1. Saldo awal Tahun Anggaran 2015

Nilai BMN per 1 Januari 2015 menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp0 (nol rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp0 (nol rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah).

##### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

###### a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	0	0	0
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0 (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0 (nol rupiah).

###### b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup>

dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah/nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m<sup>2</sup> bidang dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )
Baik	-
Rusak Ringan	-
Rusak Berat	-

Tanah yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah 0 m<sup>2</sup> /Rp0

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Sengketa	-	-
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	-
Dikuasai pihak lain	-	-
-	-	-

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Besar sebesar Rp0 (nol rupiah).

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

(nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Angkutan sebesar Rp0 (nol rupiah).

### 3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp0 (nol rupiah)

#### 4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pertanian sebesar Rp0 (nol rupiah).

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	-
Rusak Ringan	-
Rusak Berat	-

Bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp0 (nol rupiah).

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat - alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp0 (nol rupiah).

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp0 (nol rupiah).

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	0
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Laboratorium sebesar Rp0 (nol rupiah).

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Persenjataan sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### 10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Komputer sebesar Rp0 (nol rupiah).

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Eksplorasi sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### 12) Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Pengeboran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Pengeboran sebesar Rp0 (nol rupiah).

13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Mutasi Kurang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp0 (nol rupiah).

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp0 (nol rupiah).

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 16) Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Peraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Alat Peraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Alat Peraga sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### 18) Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Rambu-Rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Rambu-Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Rambu-Rambu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Rambu-Rambu sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### 19) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Bidang barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada bidang barang Peralatan Olah Raga sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

##### 1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Terdapat penggabungan sebuah bangunan gedung tempat tinggal atas pembangunan mess tahun 2013. Namun belum dilakukan perubahan atas gedung bangunan tersebut sehubungan dengan proses administrasi di kantor pusat BPK RI.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Gedung sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 2. Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Monumen di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Monumen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Monumen/ Tugu Peringatan/Prasasti dimaksud adalah batu ukir untuk peresmian Mess Perwakilan Provinsi NTB.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Monumen sebesar Rp0 (nol rupiah).

### 3. Bangunan Menara(4.03)

Saldo Bangunan Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Menara tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Menara tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Bangunan Menara sebesar Rp0 (nol rupiah).

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada bidang barang Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp0 (nol rupiah).

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Jalan dan Jembatan sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 2. Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bangunan Air tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bangunan Air di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Bangunan Air di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Bangunan Air sebesar Rp0 (nol rupiah).

### 3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah),

sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Pengelolaan instalasi meliputi Instalasi Air Bersih/Baku, Air Kotor, Gardu Listrik, Pengaman dan instalasi lainnya.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Instalasi Rp0 (nol rupiah).

#### 4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Pengelolaan Jaringan meliputi Jaringan air minum dan jaringan listrik.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada bidang barang Jaringan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

## 3. Hewan (6.03)

Saldo Hewan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Hewan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Hewan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Hewan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Hewan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

## 4. Ikan (6.04)

Saldo Ikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Ikan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Ikan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Ikan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 ekor dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Ikan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

#### 5. Tanaman (6.05)

Saldo Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanaman tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Tanaman tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Tanaman di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Tanaman di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

#### 6. Barang Koleksi Non Budaya (6.06)

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Barang Koleksi Non Budaya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

#### 7. Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

## g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

## h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 1. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah/unit/m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah/unit/m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah/unit/m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp0 (nol rupiah).

## 2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari pengguna operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0

### 3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Jembatan, Irigasi	0	0
5. Aset Tetap Lainnya	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi Penyusutan (BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah)
-	Rp0
-	Rp0
-	Rp0
<b>TOTAL</b>	<b>Rp0</b>

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

3. Barang Milik Negara Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Per 31 Desember 2015

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu:

Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00		0,00	-	0,00
6			0,00		0,00	-	0,00
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset yang dihentikandari penggunaan operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total (Sub Jumlah 1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub Jumlah (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub Jumlah (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total (Sub Jumlah I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 per akun neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	0	0	0
2.	Tanah	0	0	0
3.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
4.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7.	KDP	0	0	0
8.	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9.	Aset Lain-lain*)	0	0	0
	<b>Total</b>	0	0	0

\*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1.	Tahunan Tahun 2011	0	0	0%
2.	Tahunan Tahun 2012	0	0	0%
3.	Tahunan Tahun 2013	0	0	0%
4.	Tahunan Tahun 2014	0	0	0%
5.	Tahunan Tahun 2015	0	0	0%

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan Barang

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan ( )	Belum Ditetapkan Status Penggunaan ( )
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pengha-pusan	Jumlah
1.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	0	0	0	0	0
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3.	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
4.	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8.	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

Keterangan : \*) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI.

#### Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle Oleh Pengelola	-
3	Peberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

### 3. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2015 masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) ()	Ekstrakomptabel ()	Gabungan ()
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	Total	-	-	-

Daftar satker yang sampai dengan 31 Desember 2015, masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No.	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) ()	Ekstrakomptabel ()	Gabungan ()
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		-	-	-

#### 4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum (BLU) dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Satker BLU	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Total		-	-	-

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, teisah dari laporan barang ini.

#### 5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-lain pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015, adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah).

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, teisah dari laporan barang ini.

#### 6. Informasi Terkait Bmn Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

##### a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah

diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0	0
2			
3			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.**

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	-	0	0
2			
3			
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang**

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan ( )	Nilai Buku ( )
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat Yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai Perolehan ( )	Nilai Buku ( )
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Total		0	0

9. BMN Berupa Barang Permerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah)

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

-

11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penvelesaian Masalah

-

Penanggungjawab Laporan Barang  
Kuasa Pengguna Barang  
Tahun Anggaran 2015  
Kuasa Pengguna Barang,



Sumardi  
NIP 195603061986031005

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 INTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBCSISSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	JENIS TRANSAKSI URAIAN	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015

Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.  
 NIP. 195603061986031005

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 EKSTRAKOMPtabel  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBCSESSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	JENIS TRANSAKSI	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPtabel		INTRAKOMPtabel		EKSTRAKOMPtabel	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9
.....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015

Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBCSGSSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	JENIS TRANSAKSI	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN 2	3	4	5	6	7	8	9
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 BARANG BERSEJARAH  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBCSSSSKT,

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	JENIS TRANSAKSI	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP. 195603061986031005

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 ASET TAK BERWUJUD  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBCSTSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	JENIS TRANSAKSI URAIAN	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS 4	NILAI 5	KUANTITAS 6	NILAI 7	KUANTITAS 8	NILAI 9
1	2	3						
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 11**

# **LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA PER 31 DESEMBER 2015**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016

Halaman : 1

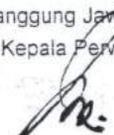
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615.000 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
	TIDAK ADA DATA	0
	J U M L A H	0

Mataram, 31 Desember 2015

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Perwakilan

  
Sumardi, S.H.  
NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 12**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – *INTRAKOMPTABEL* TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 INTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSISSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2015		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2015		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIDAK ADA DATA									
	TOTAL									

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.  
 NIP. 195603061986031005



## **LAMPIRAN 13**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – *EKSTRAKOMPTABEL* TAHUN ANGGARAN 2015**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSESSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2015		MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2015		
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIDAK ADA DATA			0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 14**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – GABUNGAN *INTRAKOMPTABEL* DAN *EKSTRAKOMPTABEL* TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSGSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2015		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2015	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 15**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – BARANG BERSEJARAH TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 BARANG BERSEJARAH  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSSSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER	
				1 JANUARI 2015	KUANTITAS	BERTAMBAH	KURANG	31 DESEMBER 2015	KUANTITAS
1		2	3	4	5	6	7	0	0
				0	0	0	0	0	0
	TIDAK ADA DATA			0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 16**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – ASET TAK BERWUJUD TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 ASET TAK BERWUJUD  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSTSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI			31 DESEMBER 2015	
		1. JANUARI 2015	5	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS
KODE	URAIAN	4	6	7	8	9	10	11
1		0	0	0	0	0	0	0
	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 17**

# **LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN – KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBSKSSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	- JUMLAH SD 1 JANUARI 2015		KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF		- JUMLAH SD 31 DESEMBER		KETERANGAN
	URAIAN	NILAI	PENAMBAHAN	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	
		0	0	0	0		
	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0		
	TOTAL	0	0	0	0		

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 18**

# **LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN - INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2015**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 INTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2015					TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
			KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015

Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 19**

# **LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN - EKSTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2015**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2015						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TIDAK ADA DATA			0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015

Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 20**

# **LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN - GABUNGAN INTRAKOMPTABEL EKSTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN 2015**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2015									
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	TIDAK ADA DATA			0	0	0	0	0	0		
	TOTAL			0	0	0	0	0	0		

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 21**

# **LAPORAN BARANG HILANG YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSAN KEPADA PENGELOLA BARANG TAHUN ANGGARAN 2015**

LAPORAN BARANG HILANGTAHUNAN  
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBMNHISSKT

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2015		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2015	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIDAK ADA DATA									
	<b>TOTAL</b>									

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 22**

**LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK  
BERAT YANG TELAH DIUSULKAN PROSES  
PENGHAPUSAN  
KEPADA PENGELOLA BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 B. P. K. PUSAT  
 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT  
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG  
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB : 004.02.23.890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal : 07-01-2016  
 Halaman : 1  
 Kode Lap. : LBMNHISSKT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER	
			1 JANUARI 2015	31 DESEMBER 2015	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015  
 Penanggung Jawab UAKPB  
 Kepala Perwakilan

*[Signature]*  
 Sumardi, S.H.  
 NIP 195603061986031005



## **LAMPIRAN 23**

# **LAPORAN KONDISI BARANG PER 31 DESEMBER 2015**

LAPORAN KONDISI BARANG  
Per 31 Desember 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

B. P. K. PUSAT

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000

Tanggal : 07-01-2016

Halaman : 1

Kode Lap. : LKBT- PKPB1

No.	Kode Barang	Sub-Sub Kelompok Nama Barang	N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X . XX . XX . XX .	-----	0	-	0	0	0	0
	Jumlah	-----	0	-	0	0	0	0

Mataram, 31 Desember 2015

Kepala Perwakilan

Sumardi, S.H.

NIP 19560306198603 1005



## **LAMPIRAN 24**

# **LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2015**

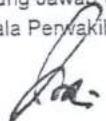
## LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000.KD

Kode	Uraian	
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Perwakilan

  
Sumardi, S.H.

NIP 195603061986031005

Mataram, 31 Desember 2015  
Petugas Pengelola Persediaan

  
Dian Ratih F.F.

198608072009012006

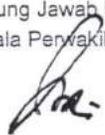
## LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015

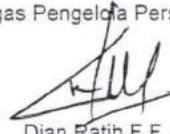
NAMA UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KODE UAKPB : 004.02.23.890615.000.KD

Kode	Uraian	
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Perwakilan  
Sumardi, S.H.

NIP 195603061986031005

Mataram, 31 Desember 2015  
Petugas Pengelola Persediaan  
Dian Ratih F.F.

198608072009012006



## **LAMPIRAN 25**

# **LAPORAN REKENING PEMERINTAH**

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON  
I BPK PUSAT

**LAPORAN REKENING PEMERINTAH  
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
ESELON I BPK PUSAT**

**PER 31 DESEMBER 2015**

---

Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

**LAPORAN REKENING PEMERINTAH**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**ESELON I BPK PUSAT**

Laporan rekening pemerintah ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-94/PB/2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Tingkat Satuan Kerja. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui secara jelas dan transparan seluruh rekening yang dikuasai oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun daftar Rekening Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I BPK Pusat adalah sebagai berikut:

---

Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (004)  
 SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT (890615)  
 KATEGORI REKENING : REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

DAFTAR REKENING  
 YANG DIPERTAHANKAN

Nomor Urut	Identitas Rekening		Nama Bank	Kelompok Rekening	Kode Satker	Tujuan	Saldo per 31 Desember 2015		Persetujuan		
	Nomor Rekening	Nama Rekening					US Dollar	Rupiah	Status	KPPN pemberi persetujuan	
1	0369530256	Bpg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	PT. Bank Negara Indonesia	Rekening Pemerintah	890615	Untuk keperluan menampung Uang untuk Keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran	8	9	10	11	
								0,00	Aktif	KPPN Mataram	
<b>Jumlah</b>									<b>0,00</b>		

Mataram, 24 Mei 2016  
 Plt. Kepala Perwakilan  
 BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono  
 NIP 197006111991031002 17



## **LAMPIRAN 26**

### **LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KAP**

**PROGRESS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN  
KAP HUSNI, MUCHARAM & RASIDI TAHUN 2014**

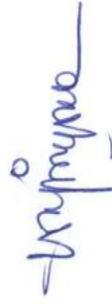
**LAPORAN KEUANGAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ESELON I BPK PUSAT SEMESTER I TAHUN 2015**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRES PER 31 DESEMBER 2015	UNIT PNG. JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mataram, 24 Mei 2016

Plt. Kepala Perwakilan

BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wahyu Priyono

NIP 197006111991031002

17



## **LAMPIRAN 27**

### **BERITA ACARA REKONSILIASI**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS www.kppn-mataram.net

### Berita Acara Rekonsiliasi

BAR- 917 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan April tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Januari tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Januari tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	7.775.770.000	7.775.770.000	-
2	Belanja	1.038.014.000	1.038.014.000	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	200.000.000	200.000.000	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA  
MATARAM  
Zakariah H. Mustafa  
NIP. 40040041095021004

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Eldy Mustafa  
NIP 195609181986021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi  
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Januari 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Belanja

SiAP	= Rp	7.775.770.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	7.775.770.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

2. Estimasi Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

3. Realisasi Belanja

SiAP	= Rp	1.038.014.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	1.038.014.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

4. Pengembalian Belanja

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

5. Realisasi Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

6. Pengembalian Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

7. Mutasi Uang Persediaan

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

9. Kas Pada Badan Layanan Umum

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementrian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Umum Negara  
Keuangan Sektor Verifikasi dan Akuntansi



H. Mustafa  
NIP 196402041985031004



Eddy Mustafa  
NIP 195609181986021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS www.kppn-mataram.net

**Berita Acara Rekonsiliasi**

BAR- 918 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan April tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Februari tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Februari tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SIAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SIAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	75.130.000	75.130.000	-
3	Pengembalian Belanja	3.000.000	3.000.000	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
 Kepala Seksi Rekonsiliasi dan Akuntansi

  
 M. Mustafa  
 0041005004004

  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Eldy Mustafa  
 NIP 195609181986021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi  
Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Februari 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	75.130.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	75.130.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	3.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	3.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

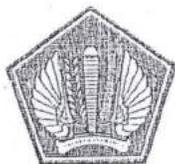
SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kepala Bendahara Umum Negara  
Kantor Seksi Identifikasi dan Akuntansi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS [www.kppn-mataram.net](http://www.kppn-mataram.net)

### Berita Acara Rekonsiliasi

BAR- 919 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Maret tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Maret tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	507.220.975	507.220.975	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNBPN	-	-	-
5	Pendapatan PNBPN	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNBPN	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.



Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Zakariah H. Mustafa

NIP. 1964102041985031004



Eldy Mustafa

NIP 195609181986021001

Tanggal 7 Juli 2015

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Maret 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPN**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP = Rp 507.220.975,00

SAI/SA-BUN = Rp 507.220.975,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPN**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPN**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP = Rp 200.000.000,00

SAI/SA-BUN = Rp 200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

n

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00  
SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a. p. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kabara Seksi Verifikasi dan Akuntansi



KEMENTERIAN KEARSIFAN DAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEARSIFAN DAN KEMENTERIAN  
KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA  
MATARAM  
KARYIL DIJEN PERBENDAHARAAN  
Zakaria H. Mustafa  
NIP. 196402041985031004



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
Kuasa Pengguna Anggaran  
PERWAKILAN  
PROVINSI MATARAM  
Edy Mustafa  
NIP. 195609181986021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS [www.kppn-mataram.net](http://www.kppn-mataram.net)

**Berita Acara Rekonsiliasi**

BAR- *yoo* /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan April tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode April tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	1.292.787.307	1.292.787.307	-
3	Pengembalian Belanja	95.391.583	95.391.583	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
 Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

  
 Zakaria H. Mustafa  
 NIP. 195402041985031004

  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 Eldy Mustafa  
 NIP 195609181986021001

Tanggal 7 Juli 2015

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan April 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	1.292.787.307,00
SAI/SA-BUN	= Rp	1.292.787.307,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	95.391.583,00
SAI/SA-BUN	= Rp	95.391.583,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

r

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00  
SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS [www.kppn-mataram.net](http://www.kppn-mataram.net)

## Berita Acara Rekonsiliasi

BAR- 221 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Mei tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Mei tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	165.837.870	165.837.870	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.



Zakariah H. Mustafa  
NIP 196402041985031004



Eldy Mustafa  
NIP 195609181986021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Mei 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	165.837.870,00
SAI/SA-BUN	= Rp	165.837.870,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a. n. ~~Kuasa~~ Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Zakaria H. Mustafa  
NIP. 196402041985031004

Kuasa Pengguna Anggaran



Eldy Mustafa  
NIP. 195609181986021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM**

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS [www.kppn-mataram.net](http://www.kppn-mataram.net)

### Berita Acara Rekonsiliasi

BAR-1797 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Juni tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Juni tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	461.593.365	461.593.365	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

  
Ely Mustafa  
NIP 195609181986021001

Kuasa Pengguna Anggaran

  
Ely Mustafa  
NIP 195609181986021001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Juni 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPNBP**

SiAP	= Rp	
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	461.593.365,00
SAI/SA-BUN	= Rp	461.593.365,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPNBP**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPNBP**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



Zakaria H. Mustafa  
NIP 195402041985031004



Kuasa Penggubah Anggaran

Fidy Mustafa  
NIP 195609181986021001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS www.kppn-mataram.net

### Berita Acara Rekonsiliasi

BAR- 2101 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Juli tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Juli tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	156.743.088	156.743.088	-
3	Pengembalian Belanja	50.146.410	50.146.410	-
4	Estimasi Pendapatan PNB	-	-	-
5	Pendapatan PNB	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNB	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Tanggal 12 Agustus 2015

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Juli 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Pagu Anggaran Belanja

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 2. Estimasi Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 3. Realisasi Belanja

SiAP	= Rp	156.743.088,00
SAI/SA-BUN	= Rp	156.743.088,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 4. Pengembalian Belanja

SiAP	= Rp	50.146.410,00
SAI/SA-BUN	= Rp	50.146.410,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 5. Realisasi Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 6. Pengembalian Pendapatan PNBPNP

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 7. Mutasi Uang Persediaan

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 8. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

## 9. Kas Pada Badan Layanan Umum

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS www.kppn-mataram.net

### Berita Acara Rekonsiliasi

BAR-2501/WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan September tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan Agustus tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode Agustus tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	773.526.502	773.526.502	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNBP	-	-	-
5	Pendapatan PNBP	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNBP	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
pada Seksi Inspeksi dan Akuntansi



## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan Agustus 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	773.526.502,00
SAI/SA-BUN	= Rp	773.526.502,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPN**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM

JALAN LANGKO NOMOR 40 MATARAM 83125

Telepon: (0370) 632817, 621875, 633146, 631203, FAKSIMILE: (0370) 633744

SITUS www.kppn-mataram.net

**Berita Acara Rekonsiliasi**

BAR- 2901 /WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini *Kamis* tanggal 8 bulan Oktober tahun 2015, diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode bulan September tahun 2015 antara Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kode 004.02.890615.KD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram (038) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan periode September tahun anggaran beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akutansi Pusat (SIAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Pagu Belanja	-	-	-
2	Belanja	358.702.122	358.702.122	-
3	Pengembalian Belanja	-	-	-
4	Estimasi Pendapatan PNBP	-	-	-
5	Pendapatan PNBP	-	-	-
6	Pengembalian Pendapatan PNBP	-	-	-
7	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
8	Kas Di Bendahara Pengeluaran	200.000.000	200.000.000	-
9	Kas Pada Badan Layanan Umum	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-

Hasil Rekonsiliasi dituangkan kedalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

  
Zakaria N. Mustafa  
NIP. 196402041985031004

  
Eldy Mustafa  
NIP. 195609181986021001

## Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker : BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Eselon I Pusat

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP bulan September 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Pagu Anggaran Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**2. Estimasi Pendapatan PNBPNB**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**3. Realisasi Belanja**

SiAP	= Rp	358.702.122,00
SAI/SA-BUN	= Rp	358.702.122,00

terdapat perbedaan tanggal antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN hal tersebut berkenaan dengan koreksi SPM bulan April 2015 yang diusulkan koreksinya di bulan September 2015

**4. Pengembalian Belanja**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**5. Realisasi Pendapatan PNBPNB**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**6. Pengembalian Pendapatan PNBPNB**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**7. Mutasi Uang Persediaan**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SiAP	= Rp	200.000.000,00
SAI/SA-BUN	= Rp	200.000.000,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

**9. Kas Pada Badan Layanan Umum**

SiAP	= Rp	0,00
SAI/SA-BUN	= Rp	0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

SiAP = Rp 0,00

SAI/SA-BUN = Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan tidak ada

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



**BERITA ACARA REKONSILIASI**  
**NOMOR: BAR-4389/WPB.22/KP.038/2015**

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan November tahun 2015 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode sampai dengan Oktober 2015 antara Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - M A T A R A M selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode sampai dengan Oktober tahun anggaran 2015 beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

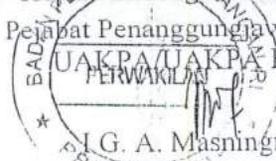
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pagu Belanja	7,775,770,000	7,775,770,000	0
2	Belanja	6,261,334,949	6,261,334,949	0
3	Pengembalian Belanja	0	-3,735,000	3,735,000
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pendapatan Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

**A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara**  
**Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi**  
  
**H. Mustafa**  
 NIP 196402041985031004

**A.n. Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Kepala Subbagian Keuangan**  
 Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi  
**UAKPA/UAKPA BUN**  
**PERWAKILAN**  
  
**I. G. A. Masningrat**  
 NIP 196712301997032002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker: 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Oktober 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pagu Belanja  
SiAP = Rp 7,775,770,000  
SAI/SA-BUN = Rp 7,775,770,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
2. Belanja  
SiAP = Rp 6,261,334,949  
SAI/SA-BUN = Rp 6,261,334,949  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
3. Pengembalian Belanja  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp -3,735,000  
Terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
4. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
5. Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
7. Pengembalian Pendapatan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
8. Mutasi Uang Persediaan  
SiAP = Rp 200,000,000  
SAI/SA-BUN = Rp 200,000,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
9. Kas di Bendahara Pengeluaran  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas pada Badan Layanan Umum
- |            |      |   |
|------------|------|---|
| SiAP       | = Rp | 0 |
| SAI/SA-BUN | = Rp | 0 |
- Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah
- |            |      |   |
|------------|------|---|
| SiAP       | = Rp | 0 |
| SAI/SA-BUN | = Rp | 0 |
- Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
12. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan ...

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

Kepala Seksi Verifikasi dan  
Akuntansi



Zakariyah H. Mustafa  
NIP 196402041985031004

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Subbagian Keuangan  
Selaku Pejabat Penanggungjawab  
Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN



G. A. Masningrat  
NIP 196712301997032002

**BERITA ACARA REKONSILIASI**  
NOMOR: BAR-5001/WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2015 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode sampai dengan November 2015 antara Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 038 - M A T A R A M selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode sampai dengan November tahun anggaran 2015 beserta Arsip Data Komputer (ADK).

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

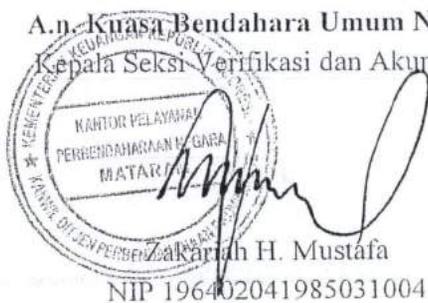
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pagu Belanja	7,775,770,000	7,775,770,000	0
2	Belanja	6,266,584,949	6,266,584,949	0
3	Pengembalian Belanja	-218,787,993	-218,787,993	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pendapatan Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

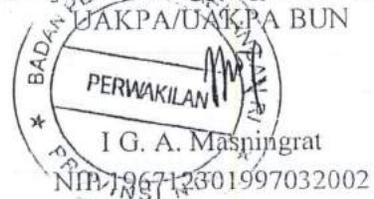
Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,

  
Zakariah H. Mustafa  
NIP 196402041985031004

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Subbagian Keuangan  
Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi

  
I G. A. Masningrat  
NIP 196712301997032002

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker: 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan November 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pagu Belanja  
SiAP = Rp 7,775,770,000  
SAI/SA-BUN = Rp 7,775,770,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
2. Belanja  
SiAP = Rp 6,266,584,949  
SAI/SA-BUN = Rp 6,266,584,949  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
3. Pengembalian Belanja  
SiAP = Rp -218,787,993  
SAI/SA-BUN = Rp -218,787,993  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
4. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
5. Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
7. Pengembalian Pendapatan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
8. Mutasi Uang Persediaan  
SiAP = Rp 200,000,000  
SAI/SA-BUN = Rp 200,000,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
9. Kas di Bendahara Pengeluaran  
SiAP = Rp 200,000,000  
SAI/SA-BUN = Rp 200,000,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

10. Kas pada Badan Layanan Umum  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

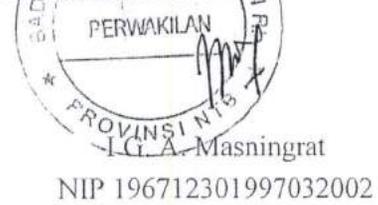
12. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Zakariah H. Mustafa  
NIP-196402041985031004

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Subbagian Keuangan Selaku  
Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi  
UAKPA/UAKPA-BUN



PERWAKILAN  
PROVINSI NIAS  
I.G.A. Masningrat  
NIP 196712301997032002

**BERITA ACARA REKONSILIASI**  
NOMOR: BAR-5301WPB.22/KP.038/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Januari tahun 2016 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode sampai dengan Desember 2015 antara Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - M A T A R A M selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode sampai dengan Desember tahun anggaran 2015 beserta Arsip Data Komputer (ADK).

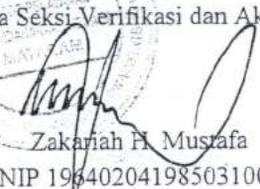
Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pagu Belanja	7,775,770,000	7,775,770,000	0
2	Belanja	7,130,380,013	7,130,380,013	0
3	Pengembalian Belanja	-277,190,193	-277,190,193	0
4	Estimasi Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pendapatan Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

**A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara**  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi  
  
Zakariah H. Mustafa  
NIP 196402041985031004

**A.n. Kuasa Pengguna Anggaran**  
Kepala Subbagian Keuangan  
  
PERWAKILAN  
I.G. A. Masmingrat  
NIP 196712301997032002  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
PROVINSI NTB

Laporan Hasil Rekonsiliasi

Satker: 890615 - BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember 2015 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pagu Belanja  
SiAP = Rp 7,775,770,000  
SAI/SA-BUN = Rp 7,775,770,000  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
2. Belanja  
SiAP = Rp 7,130,380,013  
SAI/SA-BUN = Rp 7,130,380,013  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
3. Pengembalian Belanja  
SiAP = Rp -277,190,193  
SAI/SA-BUN = Rp -277,190,193  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
4. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
5. Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
7. Pengembalian Pendapatan Pajak  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
8. Mutasi Uang Persediaan  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
9. Kas di Bendahara Pengeluaran  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN
10. Kas pada Badan Layanan Umum  
SiAP = Rp 0  
SAI/SA-BUN = Rp 0  
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah

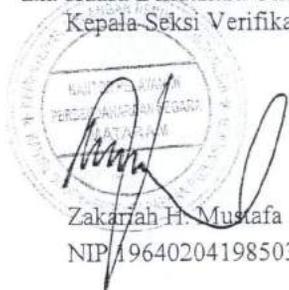
SiAP = Rp 0

SAI/SA-BUN = Rp 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN

12. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan ...

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi



Zakariah H. Mustafa  
NIP 196402041985031004

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Subagian Keuangan



I. G. A. Masmingrat  
NIP 196512301997032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
KPKNL MATARAM  
Jalan Pendidikan 24 Mataram

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA  
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD)  
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015  
NOMOR : BAR-047/WKN.14/KNL.03/2016

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam belas, bertempat di KOTA MATARAM, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : I Wayan Sudana  
NIP : 196112311982091001  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KPKNL MATARAM untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Aris Asmono, SE., Ak.  
NIP : 197010041997031004  
Jabatan : Pih. Kepala Perwakilan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara / Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2015, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2015		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan 1)	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0

- 1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;  
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.  
3) Rincian terlampir.



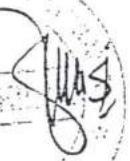
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
KPKNL MATARAM  
Jalan Pendidikan 24 Mataram

- 2 -

- I. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun 2015, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

  
Anis Asmoro, SE., Ak.  
NIP.197010041997031004

PIHAK PERTAMA,

  
  
I Wayan Sudana  
NIP.196112311982091001

\*) pilih salah satu yang paling sesuai \*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA  
KPKNL MATARAM  
Jalan Pendidikan 24 Mataram

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN  
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (004022300890615000KD)  
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
11	ASET LANCAR	0	0	0	0
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0	0

\*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN.

II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN

a. Pemutakhiran dan Mutasi Barang Milik Negara

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL Per 01-01-2015	MUTASI		SALDO AKHIR Per 31-12-2015
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
11	ASET LANCAR	0	0	0	0
1171	Persediaan 1)	0	0	0	0
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL I + II		0	0	0	0

\*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Non Keuangan

i. Mutasi Tambah BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

ii. Mutasi Kurang BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

iii. Penyusutan BMN

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
			0
TOTAL			

### III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Jalan	0	0	0	0
5	Irigasi	0	0	0	0
6	Jaringan	0	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

#### b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam Proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai Di Pengelola Barang (Dikembalikan)	0	0	0	0	0
5	Selesai Di Pengelola Barang (Ditolak)	0	0	0	0	0
6	Selesai Di Pengelola Barang (Disetujui)	0	0	0	0	0
7	Dalam Proses tindak lanjut pengguna/kuasa pengguna barang	0	0	0	0	0
8	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Tindak Lanjut Oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
10	Selesai Serah terima	0	0	0	0	0
11	Gagal/Batal Proses	0	0	0	0	0

**IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN**

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Januari Dua Ribu Enam belas adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

**V. INFORMASI PENTING LAINNYA**

a. Jumlah satuan kerja di lingkungan

Jumlah Satker	Implementasi SIMAK	Keterangan

b. Nilai BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sebesar Rp.0 yang tersebar di ... Satker, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai

c. Nilai BMN yang berasal dari belanja subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan belanja lainnya (Bagian Anggaran 999.08) sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai

d. Nilai BMN yang berasal dari Dana Stimulus Fiskal tahun anggaran 2015 sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai

e. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN :

No	Uraian

f. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah :

No	Uraian

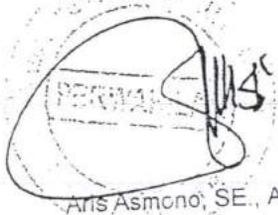
g. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN :

No	Uraian

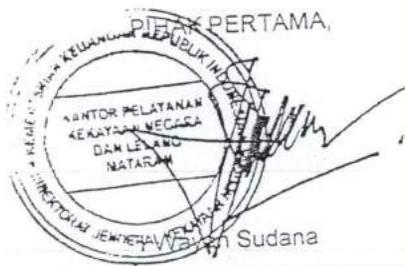
h. Informasi lain yang dianggap perlu :

No	Uraian

PIHAK KEDUA,



Aris Asmono, SE., Ak.  
NIP.197010041997031004



PIHAK PERTAMA,  
NIP.196112311982091001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

*Jl. Udayana No.22 Telp. (0370) 6163333 Fax. (0370) 6162999 Mataram – Nusa Tenggara Barat*

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA  
PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 12D/BARIDBMN/01/2016 (DIPA PUSAT)**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **2016**, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Maula Rusindrawan  
NIP : 197406131999031002  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan TI

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : I G. A. Masningrat  
NIP : 196712301997032002  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode **Tahunan** Tahun Anggaran 2015, dengan hasil sebagai berikut:

III. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2015		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Software	-	-	-
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	-	-	-
1	Aset Lain-lain	-	-	-
<b>D</b>	<b>TOTAL INTRAKOMPTABEL (A+B+C)</b>	-	-	-
<b>E</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>	-	-	-
<b>F</b>	<b>TOTAL GABUNGAN (D+E)</b>	-	-	-



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

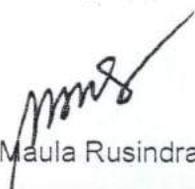
*Jl. Udayana No.22 Telp. (0370) 6163333 Fax. (0370) 6162999 Mataram – Nusa Tenggara Barat*

IV. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun Anggaran **2015**, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbagian Umum dan TI,

Kepala Subbagian Keuangan,

  
Maula Rusindrawan

NIP. 197406131999031002

  
I G. A. Masningrat

NIP. 196712301997032002

Mengetahui,  
Kepala Perwakilan

  
Sumardi

NIP. 195603061986031005

**REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN**  
**PERIODE LAPORAN MULAI BULAN : JANUARI S.D DESEMBER 2015**

004.02.2300.890615.KD : BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

KDAKUN	URAIAN AKUN	TRN	URAIAN TRN	RUPIAH SIMAK	RUPIAH SAK	SELISIH
117111	Barang Konsumsi	K01	Pemakaian	-29,366,270	-29,366,270	0
117111	Barang Konsumsi	KO	Koreksi Penyesuaian Persediaan	254,070	254,070	0
117111	Barang Konsumsi	M02	Pembelian	29,112,200	29,112,200	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	407	Uraian Transaksi Tidak Ada	0	42,366,499	42,366,499
593111	Beban Persediaan konsumsi	K01	Pemakaian	29,366,270	29,366,270	0
<b>J U M L A H</b>				<b>29,366,270</b>	<b>71,732,769</b>	<b>42,366,499</b>

Kasubag Umum dan TI

  
Maula Rusindrawan  
NIP. 197406131999031002

Mataran, 17-02-16  
Kasubbag Keuangan

  
I Gusti Ayu Masningrat  
NIP. 196712301997032002



## **LAMPIRAN 28**

**DAFTAR SSBP UNTUK PENYETORAN SISA UP  
TAHUN 2015 DAN  
DAFTAR PENYETORAN KAS LAINNYA DAN  
SETARA KAS  
PER 31 DESEMBER 2015  
KE KAS NEGARA**



Data Pembayaran :  
tanggal dan Jam Bayar : 30/10/2015 08:30 NTE : 000000196180  
tanggal Buku : 30/10/15 NTEK : 18708BINVRE000000  
kode Cabang Bank : 38 STAN : 196180  
MATAHARI  
No. Smporan :  
Billing : 220151229798445  
ura Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI NTE  
Kementerian / Lembaga : 004  
Unit Eselon I : 01  
Aduan Kerja : 890625  
jumlah Setoran : 303.708.868,00 Mata Uang : IDR  
terbilang : tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh  
rupiah

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan  
Ibu tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses



**BNI**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Mataram Branch





## **LAMPIRAN 29**

# **FOTOKOPI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2015**

Kementerian/Lembaga : ( 004 ) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 Unit Organisasi : ( 02 ) B. P. K. PUSAT  
 Provinsi/Kab/Kota : ( 51 ) KOTA MATARAM  
 Satuan Kerja : ( 890615 ) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Alamat dan Telp. : Jalan Udayana Nomor 22  
 No Krws & Kewenangan: ( 0001.KD ) Kantor Daerah  
 Dokumen : ( 01 ) DIPA  
 Nomor Dokumen : DIPA-004.02.2.890615/2015  
 Tanggal Dokumen : 14-11-2014  
 Tahun Anggaran : 2015  
 KPPN : ( 038 ) MATARAM

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: K00423

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BP Kas, BPP, dan UM Perjadin</b>	158.369.400	1.786.994.436	1.945.363.836	0
	1. BP Kas (tunai dan bank)	88.369.400	1.786.994.436	1.875.363.836	0
	2. BP Uang Muka/Voucher	70.000.000	0	70.000.000	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin</b>	158.369.400	839.411.422	997.780.822	0
	1. BP UP *)	158.369.400	823.258.014	981.627.414	0
	2. BP LS-Bendahara	0	4.325.000	4.325.000	0
	3. BP Pajak	0	11.828.408	11.828.408	0
	4. BP Lain-lain	0	0	0	0

\*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (-)
<b>3. Jumlah kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0 (-)
<b>3. Selisih Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Kuitansi UP	Rp.	0 (-)
<b>3. Jumlah UP</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0 (-)
<b>5. Selisih Pembukuan UP</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. -- Tidak Ada --
2. -- Tidak Ada --



KOTA MATARAM, 31-12-2015

Bendahara Pengeluaran,

*[Signature]*

Ritmawan Hidayat

NIP. 198609202008011003

LPJ diterima tanggal.....  
 Telah diverifikasi, tanggal 5 JAN 2016 No.....

a.n. Kepala KPPN Mataram

Pih Kepala Seksi Vertifikasi dan Akuntan

*[Signature]*  
**RADIAN ARDHI NURCAHYO**  
 NIP. 197610102002121001

\*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING  
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 890615  
BULAN : DESEMBER 2015

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	0369530256	BPg 038 BPK Perwakilan Provinsi NTB	BNI Cabang Mataram	20	S-205/WPB.22/KP.0130/2015	21-01-2015	0

\* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

\*\* Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



Ritmawan Hidayat  
NIP. 198609202008011003

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Kamis Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: K00423

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

## I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

### A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0	
2. Saldo BP BPP	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0	
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.		0

### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0	
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0	
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0	
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.		0

### C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5)

Rp.

0

## II Hasil Pemeriksaan Kas:

### A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0	
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.		0

### B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)

Rp.

0

## III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

### A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0	
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0	
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.		0

### B. Pembukuan UP menurut UAKPA

Rp.

0

### C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B)

Rp.

0

## IV Penjelasan atas selisih

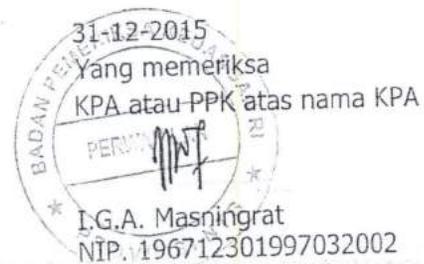
### A. Selisih Kas (II.B)

### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran



Ritmawan Hidayat  
NIP. 198609202008011003



# BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA

Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Kamis Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: K00423

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

## I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

### A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas ( Tunai dan Bank)	Rp.	0
2. Saldo BP BPP	Rp.	0
3. Saldo BP Uang Muka ( Voucher)	Rp.	0
4. Jumlah ( A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	0

### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
5. Jumlah ( B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	0

C. Selisih Pembukuan ( A.4 - B.5) Rp. 0

## II Hasil Pemeriksaan Kas:

### A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas ( A.1 + A.2)	Rp.	0

B. Selisih Kas ( I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

## III Penjelasan atas selisih Kas

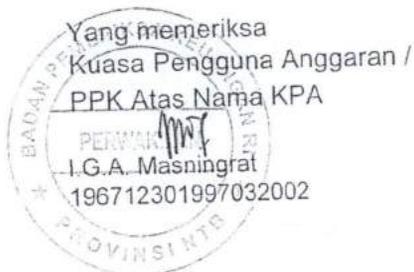
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara Pengeluaran. Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima

31-12-2015 17:00:04

Yang menerima



Anita Noviana  
199001112010022001



31-12-2015

Yang menyerahkan



Ritmawan Hidayat  
198609202008011003





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

# NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JAN-2016

KPPN : MATARAM

Kode Satker : 890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Setor	Keterangan
1	MATARAM	8300004508	03-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0004031013010707 - 000370444888	411121	IDR	159.000,00	Ada
2	MATARAM	8300004508	21-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0106030907090806 - 000319784081	411124	IDR	393.244,00	Ada
3	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0111001204090509 - 000319961511	411121	IDR	99.000,00	Ada
4	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0204050903051408 - 000319961514	411121	IDR	768.750,00	Ada
5	MATARAM	8300004508	13-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0405090908151402 - 000370501257	411121	IDR	45.000,00	Ada
6	MATARAM	38360209001350	16-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0503021502060615 - 000000291762	411121	IDR	1.056.000,00	Ada
7	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0504140202151100 - 000319961516	411121	IDR	99.000,00	Ada
8	MATARAM	8300004508	27-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0508100411091508 - 000370447304	411121	IDR	181.000,00	Ada
9	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	KUBUS MEDIA ADVERTISAMA	0612090414130212 - 000319961507	411211	IDR	1.227.273,00	Ada
10	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0704070411151312 - 000319961510	411121	IDR	108.000,00	Ada
11	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0712110102040209 - 000319961509	411121	IDR	135.000,00	Ada
12	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0904111006080010 - 000319961506	411121	IDR	135.000,00	Ada
13	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0904150713011213 - 000319961505	411121	IDR	1.056.000,00	Ada
14	MATARAM	8300004508	17-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0906020502020113 - 000319975690	411121	IDR	858.000,00	Ada
15	MATARAM	8300004508	16-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	0908101513150211 - 000319901363	411121	IDR	69.000,00	Ada
16	MATARAM	8300004508	26-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1012080812081407 - 000382551460	411121	IDR	132.000,00	Ada
17	MATARAM	8300004508	03-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1200120614091015 - 000282666580	411121	IDR	578.000,00	Ada
18	MATARAM	8300004508	27-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1202140311000607 - 000370447306	411121	IDR	135.000,00	Ada
19	MATARAM	8300004508	21-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1204150802110012 - 000319969332	411121	IDR	1.056.000,00	Ada

Dicetak oleh : Henry Rosamirandha.  
Tanggal Cetak : 14-Jan-2016 02:16:11 MALAM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

## NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JAN-2016

KPPN : MATARAM

Kode Satker : 890615 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WBWS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Setor	Keterangan
				BPK RI P					
20	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1301010704151313 - 000319961513	411121	IDR	90.000,00	Ada
21	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	KUBUS MEDIA ADVERTISAMA	1305040403130305 - 000319961508	411122	IDR	184.091,00	Ada
22	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1307030312010814 - 000319961517	411121	IDR	135.000,00	Ada
23	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1307120002071409 - 000319961515	411121	IDR	562.500,00	Ada
24	MATARAM	8300004508	27-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1308150014021105 - 000370447307	411121	IDR	45.000,00	Ada
24	MATARAM	8300004508	23-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1310060200130607 - 000319784284	411121	IDR	66.000,00	Ada
25	MATARAM	8300004508	27-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1314051405080110 - 000370447305	411121	IDR	75.000,00	Ada
26	MATARAM	8300004508	27-NOV-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1407141314010912 - 000319961512	411121	IDR	882.000,00	Ada
27	MATARAM	8300004508	18-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1412080412061511 - 000370543421	411121	IDR	347.000,00	Ada
28	MATARAM	8300004508	21-OKT-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1501091009011007 - 000370445520	411121	IDR	144.500,00	Ada
29	MATARAM	8300004508	08-DES-2015	BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI P	1F7595INVRB0VFF9 - 000000196180	815511	IDR	303.766.865,00	Ada
30		3010194605	30-DES-2015	Bendahara Pengeluaran BPK Perwakilan Provinsi NTB	7ESB05T3OTQ7EJ70 - 000282667446	411211	IDR	1.007.050,00	Ada
31		1010000244	14-DES-2015	PRIMER JARINGAN KOMPUTER	FC9AE5IRFA9TJMF9 - 000000212804	815111	IDR	46.085,00	Ada
32		3010194605	30-DES-2015	Bendahara Pengeluaran BPK Perwakilan Provinsi NTB					

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara

**HERI PURMANANTO**  
 Henry Rosamirandha  
 NIP. 19840527 200312 1 005

: Henry Rosamirandha,  
: 14-Jan-2016 02:16:11 MALAM

Dicetak oleh  
Tanggal Cetak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

# NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JAN-2016

NIP.197110011997031001

Dicetak oleh : Henry Rosamirandha.  
Tanggal Cetak : 14-Jan-2016 02:16:11 MALAM



## **LAMPIRAN 30**

# **DAFTAR ASET YANG BERASAL DARI BELANJA BARANG TAHUN 2015**





## **LAMPIRAN 31**

# **DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI TAHUN 2015**





## **LAMPIRAN 32**

### **LAMPIRAN PENDUKUNG CaLK**















